

Representasi Kekuasaan dalam Teks Pidato Presiden Prabowo Subianto: Tinjauan AWK Norman Fairclough

Nouval Rumaf¹

Dadang S. Anshori²

Vismaia S. Damaianti³

Andoyo Sastromiharjo⁴

Siti Fatihaturrahmah Al Jumroh⁵

¹²³⁴Universitas Pendidikan Indonesia

⁵Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

¹nouvalfatih28@upi.edu

²dadanganshori@upi.edu

³vismaia@upi.edu

⁴andoyo@upi.edu

⁵sitifatihaturrahmahaljumroh@unimudasorong.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi kekuasaan dalam teks pidato perdana Presiden Prabowo Subianto pada acara pelantikan presiden dan wakil presiden tahun 2024 menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough. Fokus penelitian ini meliputi tiga aspek utama: (1) mengungkap nilai eksperensial, (2) mengungkap nilai relasional, dan (3) mengungkap nilai ekspresif dalam teks pidato tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis teks yang berpijak pada model tiga dimensi Fairclough, yakni analisis teks, praktik diskursif, dan praktik sosiokultural. Data penelitian ini berupa kutipan kata, frasa, klausa, dan kalimat. Sumber data dalam penelitian ini berupa teks pidato perdana Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan pada 20 Oktober 2024 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, yang diperoleh dari Sekretariat Negara Republik Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam dimensi analisis teks, nilai eksperensial dalam pidato Presiden Prabowo dimanifestasikan melalui penggunaan kosakata (*wording*, *overwording*, dan *metafora*) serta tata bahasa (*transitivitas* dan *nominalisasi*) yang mencerminkan ideologi nasionalisme, kemandirian ekonomi, dan persatuan bangsa. Nilai relasional terungkap melalui penggunaan modalitas ('harus', 'akan', 'dapat'), eufemisme, dan struktur kesantunan yang membangun relasi kekuasaan antara Presiden dengan rakyat, institusi negara, dan dunia internasional. Nilai ekspresif termanifestasi dalam evaluasi positif terhadap keberagaman Indonesia dan komitmen pada nilai-nilai Pancasila melalui penggunaan kata sifat evaluatif dan strategi legitimasi. Pada dimensi praktik diskursif, ditemukan intertekstualitas dengan pidato-pidato presiden sebelumnya dan referensi pada teks-teks kebangsaan, sementara dalam dimensi praktik sosiokultural terungkap kontestasi wacana populisme dan teknokrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa representasi kekuasaan dalam pidato perdana Presiden Prabowo menunjukkan perpaduan antara otoritas kepemimpinan yang kuat dengan upaya membangun solidaritas nasional dan internasional, yang mencerminkan orientasi ideologis dan agenda politik pemerintahannya.

Kata kunci: Analisis Wacana Kritis, representasi kekuasaan, pidato kepresidenan, Prabowo Subianto

Abstrack

This research aims to analyze the representation of power in the inaugural speech of President Prabowo Subianto at the presidential and vice-presidential inauguration ceremony in 2024 using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA) approach. The research focuses on three main aspects: (1) revealing experiential values, (2) revealing relational values, and (3) revealing expressive values in the speech text. The research method used is qualitative descriptive with text analysis techniques based on Fairclough's three-dimensional model, namely text analysis, discursive practice, and sociocultural practice. The research data consist of quotes of words, phrases, clauses, and sentences. The data source is the inaugural speech of President Prabowo Subianto delivered on October 20, 2024, at the MPR/DPR RI Building in Jakarta, obtained from the State Secretariat of the Republic of Indonesia. The results show that in the text analysis dimension, experiential values in President Prabowo's speech are manifested through the use of vocabulary (wording, overwording, and metaphors) and grammar (transitivity and nominalization) that reflect ideologies of nationalism, economic independence, and national unity. Relational values are revealed through the use of modalities ('must', 'will', 'can'), euphemisms, and politeness structures that build power relations between the President and the people, state institutions, and the international community. Expressive values are manifested in positive evaluations of Indonesia's diversity and commitment to Pancasila values through the use of evaluative adjectives and legitimation strategies. In the discursive practice dimension, intertextuality with previous presidential speeches and references to national texts were found, while in the sociocultural practice dimension, the contestation of populism and technocracy discourses was revealed. This research concludes that the representation of power in President Prabowo's inaugural speech shows a combination of strong leadership authority and efforts to build national and international solidarity, reflecting the ideological orientation and political agenda of his administration.

Keywords: *Critical Discourse Analysis, power representation, presidential speech, Prabowo Subianto*

Pendahuluan

Pidato perdana seorang kepala negara pada acara pelantikan merupakan momen krusial yang tidak hanya menandai transisi kepemimpinan tetapi juga memberikan gambaran tentang visi, misi, dan orientasi ideologis pemerintahan baru. Melalui pidatonya, seorang presiden tidak sekadar menyampaikan pesan, tetapi juga membangun legitimasi kekuasaan dan menegosiasikan posisinya dalam konstelasi politik nasional dan internasional. Dalam konteks ini, pidato perdana Presiden Prabowo Subianto pada acara pelantikan presiden dan wakil presiden tahun 2024 menarik untuk dikaji secara kritis, khususnya berkaitan dengan bagaimana kekuasaan direpresentasikan melalui penggunaan bahasa.

Prabowo Subianto, yang sebelumnya dikenal sebagai tokoh militer dan politisi dengan latar belakang yang kontroversial, kini menduduki posisi tertinggi dalam struktur kekuasaan negara Indonesia. Transisi dari oposisi menjadi pemegang kekuasaan tentu berimplikasi pada bagaimana ia memposisikan diri dan mengkonstruksi wacana kepemimpinannya melalui bahasa.

Secara spesifik, pidato perdana Prabowo hadir dalam konteks politik Indonesia yang masih diwarnai polarisasi pasca-kontestasi elektoral yang ketat, ketegangan geopolitik global dengan persaingan AS-China, serta tantangan ekonomi domestik berupa ancaman resesi dan ketimpangan sosial yang makin melebar. Dalam situasi ini, strategi linguistik yang digunakan Prabowo dalam pidatonya menjadi instrumen penting untuk meneguhkan legitimasi kekuasaannya, merekatkan polarisasi, serta membangun

narasi tentang arah kebijakan ekonomi-politik domestik dan *positioning* Indonesia dalam politik internasional.

(Fairclough, 2013) menegaskan bahwa, wacana bukan sekadar refleksi realitas sosial, melainkan juga instrumen yang membentuk realitas sosial itu sendiri. Dengan demikian, analisis terhadap wacana kepresidenan Prabowo menjadi penting untuk memahami dinamika kekuasaan dan ideologi yang mendasari kebijakan-kebijakan yang akan diimplementasikan selama masa pemerintahannya.

Lebih lanjut, (DIJK, 2021) yang menegaskan bahwa wacana politik, termasuk pidato kepresidenan, secara fundamental merupakan bentuk aksi politik yang diartikulasikan melalui bahasa. Menurut van Dijk, "wacana politik tidak hanya mencerminkan pertarungan politik tetapi juga merupakan bagian inheren dari pertarungan itu sendiri."

Demikian pula, (Ruth Wodak, 2019) berpendapat bahwa pidato inaugural presiden memiliki dimensi performatif yang kuat, di mana bahasa tidak hanya menggambarkan realitas tetapi juga menciptakan realitas baru. Mereka menyatakan bahwa "Analisis wacana kritis mencoba menjelaskan bagaimana bahasa mereproduksi atau menantang status quo politik, dan bagaimana wacana dominan memanifestasikan, menyembunyikan, atau melegitimasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan".

Penelitian ini mengkaji representasi kekuasaan dalam pidato perdana Presiden Prabowo Subianto dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough. Kajian ini tidak hanya relevan untuk memahami orientasi ideologis pemerintahan baru, tetapi juga untuk mengungkap bagaimana wacana kepresidenan berkontribusi pada pembentukan realitas politik dan hubungan kekuasaan di Indonesia pasca-pemilihan 2024.

Pemilihan AWK Norman Fairclough sebagai kerangka analisis didasarkan pada beberapa pertimbangan metodologis yang saling terkait. *Pertama*, Fairclough menawarkan kerangka analisis tiga dimensi (analisis teks, praktik diskursif, dan praktik sosiokultural) yang komprehensif. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada fitur-fitur linguistik dalam teks pidato Prabowo, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks produksi dan konsumsi teks serta implikasinya terhadap struktur sosial yang lebih luas. *Kedua*, AWK Fairclough secara eksplisit mengkaji hubungan dialektis antara wacana dan kekuasaan, yang menjadi fokus utama penelitian ini. Pendekatan ini memberikan alat analitis untuk mengidentifikasi bagaimana kekuasaan direpresentasikan, dilegitimasi, dan dinaturalisasi melalui penggunaan bahasa dalam pidato Prabowo. *Ketiga*, model Fairclough sangat relevan untuk menganalisis wacana dalam konteks transisi politik dan perubahan relasi kekuasaan, seperti yang terjadi dalam kasus terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden Indonesia. Keempat, konsep intertekstualitas dan interdiskursivitas yang dikembangkan Fairclough sangat berguna untuk menganalisis bagaimana pidato Prabowo berdialog dengan teks-teks dan wacana-wacana sebelumnya. *Kelima*, Fairclough memberikan perhatian khusus pada dimensi historis dari praktik diskursif, yang sangat relevan untuk memahami pidato Prabowo dalam konteks karier politiknya yang panjang. *Keenam*, model ini menyediakan perangkat analitis yang terperinci untuk analisis linguistik, termasuk analisis kosakata, tata bahasa, dan struktur tekstual, yang memungkinkan identifikasi dan interpretasi mendalam terhadap pilihan-pilihan linguistik dalam pidato Prabowo. *Ketujuh*, AWK Fairclough tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan praktik diskursif, tetapi juga memiliki orientasi emansipatoris untuk mengungkap dan menantang relasi kekuasaan yang tidak setara. Pendekatan ini memberikan alat analitis untuk mengidentifikasi bagaimana kekuasaan direpresentasikan, dilegitimasi, dan dinaturalisasi melalui penggunaan

bahasa. Oleh karena itu, yang menjadi fokus utama peneliti mencakup: (1) mengungkap nilai eksperensial dalam teks pidato, (2) mengungkap nilai relasional dalam teks pidato, dan (3) mengungkap nilai ekspresif dalam teks pidato tersebut (Fairclough, 1989).

Kontribusi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: a) Memperkaya pemahaman tentang manifestasi nilai eksperensial, relasional, dan ekspresif dalam wacana politik Indonesia, dengan contoh-contoh empiris dalam teks pidato kepresidenan kontemporer; b) Mendemonstrasikan bagaimana teori kekuasaan dalam wacana (*power in discourse*) dapat dioperasionalkan untuk menganalisis strategi-strategi linguistik yang digunakan pemimpin politik dalam membangun legitimasi dan menegosiasikan posisinya; c) Kerangka analisis sistematis untuk mengkaji representasi kekuasaan dalam pidato politik di Indonesia, yang dapat direplikasi dan diadaptasi untuk penelitian-penelitian serupa di masa depan; d) Menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang orientasi ideologis pemerintahan Prabowo melalui analisis kritis terhadap pidato perdananya, yang dapat menjadi dasar untuk memahami dan memprediksi arah kebijakan yang akan ditempuh; e) Memberikan wawasan bagi masyarakat sipil, akademisi, dan pengamat politik dalam memahami dan merespons wacana politik pemerintahan baru secara lebih kritis dan informatif; f) Memperkaya literasi kritis warga negara terhadap wacana politik, yang penting untuk partisipasi demokratis yang bermakna dan pengawasan publik terhadap kekuasaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang analisis wacana dan linguistik, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memahami dinamika politik Indonesia kontemporer melalui perspektif yang lebih kritis dan reflektif.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam makna di balik penggunaan bahasa dalam konteks sosial-politik tertentu (Guetterman et al., 2015). Sementara itu, model analisis wacana kritis Fairclough dipilih karena kerangka teoretisnya yang komprehensif dalam menghubungkan analisis linguistik dengan teori sosial untuk mengungkap relasi kekuasaan yang tersembunyi dalam wacana. Data penelitian ini berupa kutipan kata, frasa, klausa, dan kalimat. Sumber data dalam penelitian ini berupa teks pidato perdana Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan pada 20 Oktober 2024 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, yang diperoleh dari Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/sidang-paripurna-mpr-ri-dalam-rangka-pelantikan-presiden-dan-wakil-presiden-ri-terpilih-periode-2024-2029-di-gedung-nusantara-mpr-dpr-dpd-ri-senayan-jakarta-20-oktober-2024/>. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dan analisis dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model tiga dimensi Norman Fairclough yang meliputi: Analisis Teks (Mikro), Analisis Praktik Diskursif (Meso), dan Analisis Praktik Sosiokultural (Makro).

Hasil

Berdasarkan analisis terhadap teks pidato perdana Presiden Prabowo Subianto pada acara pelantikan presiden dan wakil presiden tahun 2024, ditemukan berbagai representasi kekuasaan yang termanifestasi melalui nilai eksperensial, relasional, dan ekspresif. Berikut ini adalah tabel hasil analisis berdasarkan ketiga nilai tersebut:

Tabel: 01
Hasil Analisis Representasi Kekuasaan dalam Teks Pidato
Presiden Prabowo Subianto
Nilai Eksperensial

Aspek	Temuan	Contoh
Kosakata Ideologis	Penggunaan kosakata bermuatan nasionalisme dan kemandirian ekonomi seperti <i>kedaulatan, kemandirian, persatuan, gotong royong, dan kebangkitan nasional</i> .	"Kita harus kembali pada prinsip kedaulatan dalam segala bidang, terutama kedaulatan politik dan ekonomi, sebagai fondasi untuk membangun Indonesia yang mandiri dan berdikari."
Pola Kategorisasi	Dikotomi antara "kita" (Indonesia) dan "mereka" (negara/kekuatan asing).	"Terlalu lama kita menjadi pasar bagi produk asing, sementara potensi kekayaan alam kita dieksploitasi untuk kepentingan mereka. Saatnya kita menentukan nasib ekonomi kita sendiri."
Struktur Gramatikal	Kalimat aktif digunakan untuk menyatakan rencana kebijakan; kalimat pasif untuk menggambarkan masalah atau hambatan eksternal.	Aktif: "Pemerintahan saya akan memprioritaskan pembangunan industri pengolahan..." Pasif: "Selama ini, sumber daya alam Indonesia telah dieksploitasi tanpa memperhatikan keberlanjutan dan keadilan bagi rakyat."
Nilai Relasional		
Aspek	Temuan	Contoh
Modalitas	- Modalitas deontik: <i>harus, wajib, perlu</i> untuk menunjukkan kewajiban.- Modalitas epistemik: <i>akan, yakin, pasti</i> untuk menunjukkan komitmen/keyakinan.	Deontik: "Kita harus bersatu menjaga kedaulatan negara dari segala bentuk intervensi asing." Epistemik: "Saya yakin dengan kerja keras dan komitmen bersama, Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2045."
Eufemisme & Disfemisme	- Eufemisme untuk meredam isu sensitif.- Disfemisme untuk memperkuat kritik terhadap praktik merugikan.	Eufemisme: "Penyesuaian kebijakan ekonomi" (alih-alih "pengurangan subsidi"). Disfemisme: "Penjarahan kekayaan nasional" (mengacu pada eksploitasi SDA oleh pihak asing).
Struktur Kesantunan	Penggunaan sapaan hormat, pronomina inklusif, dan ekspresi penghargaan sebagai bentuk kedekatan dan hormat terhadap audiens.	"Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati, mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang bermartabat dan berdaulat."
Nilai Ekspresif		
Aspek	Temuan	Contoh
Evaluasi Positif & Negatif	Evaluasi positif terhadap nilai-nilai lokal; evaluasi negatif terhadap neoliberalisme dan ketergantungan luar negeri.	Positif: "Kearifan lokal dan semangat gotong royong adalah modal sosial berharga..." Negatif: "Ketergantungan pada impor telah melemahkan

Metafora & Analogi	Metafora <i>bangunan</i> dan <i>perjalanan</i> untuk menekankan visi transformasional.	ketahanan pangan..." "Indonesia adalah rumah besar kita bersama..." "Perjalanan menuju Indonesia maju adalah maraton, bukan sprint."
Pronomina & Atribusi	- "Saya" digunakan untuk menunjukkan komitmen pribadi. - "Kita" untuk menekankan kolaborasi dan tanggung jawab bersama.	"Saya": "Sebagai presiden, saya berkomitmen untuk membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi." "Kita": "Tantangan global yang kita hadapi membutuhkan solidaritas dan kerja sama semua pihak."

Pembahasan

Analisis terhadap nilai eksperensial, relasional, dan ekspresif dalam teks pidato perdana Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kompleksitas representasi kekuasaan yang dibangun melalui penggunaan bahasa. Berikut ini pembahasan komprehensif mengenai temuan-temuan utama penelitian:

Konstruksi Ideologi Nasionalisme Ekonomi

Nilai eksperensial dalam teks pidato Prabowo menunjukkan orientasi ideologis yang kuat terhadap nasionalisme ekonomi. Analisis wacana kritis terhadap data linguistik dalam pidato mengungkapkan beberapa pola signifikansi yang mendukung konstruksi ideologi ini.

Pertama, analisis leksikal menunjukkan penggunaan berulang (*overwording*) kata-kata yang terkait dengan kedaulatan ekonomi. Data menunjukkan bahwa kata "kedaulatan" muncul 7 kali, "kemandirian" 5 kali, dan "berdikari" 3 kali dalam pidato tersebut. Prabowo secara eksplisit menyatakan: "Kita harus mewujudkan ekonomi yang berdikari, yang tidak lagi tergantung pada kekuatan asing" dan "Kemandirian ekonomi adalah kunci bagi kedaulatan negara kita di panggung global." Pengulangan leksikal ini, sebagaimana dijelaskan (Fairclough, 2013) mencerminkan preokupasi ideologis dengan konsep tertentu dan berfungsi untuk menanamkan konsep tersebut dalam kesadaran audiens.

Kedua, analisis transitivitas dalam klausa-klausa terkait ekonomi menunjukkan pola yang konsisten. Indonesia sering diposisikan sebagai "goal" atau penerima tindakan dalam struktur pasif ketika berhubungan dengan ekonomi global, misalnya: "Indonesia telah lama dieksploitasi oleh kekuatan ekonomi asing" dan "Kekayaan alam kita dijarah untuk kepentingan negara lain." Sebaliknya, dalam visi ekonomi masa depan, Indonesia diposisikan sebagai "actor" dengan penggunaan struktur aktif: "Indonesia akan membangun industri pengolahan sendiri" dan "Kita akan menguasai rantai produksi dari hulu ke hilir." Pola transitivitas ini menunjukkan transformasi narasi dari Indonesia sebagai korban menjadi agen aktif dalam ekonomi, yang memperkuat ideologi nasionalisme ekonomi.

Ketiga, analisis metafora konseptual dalam pidato mengungkapkan penggunaan metafora "perang" dan "perjuangan" dalam konteks ekonomi. Misalnya, Prabowo menyatakan: "Kita berada dalam medan pertempuran ekonomi global" dan "Perjuangan ekonomi adalah kelanjutan dari perang kemerdekaan kita." Metafora-metafora ini berfungsi untuk membingkai isu ekonomi sebagai pertarungan eksistensial yang memerlukan mobilisasi nasional dan perlindungan dari "musuh" eksternal, yang memperkuat narasi nasionalistik.

Keempat, nominalisasi isu ekonomi juga ditemukan dalam pidato, di mana proses ekonomi kompleks disederhanakan menjadi entitas nominal. Contohnya terlihat dalam frasa seperti "penghisapan ekonomi" dan "penjajahan ekonomi modern" yang menghilangkan agen spesifik dan proses yang terlibat, sehingga naturalisasi konstruksi Indonesia sebagai korban eksploitasi tanpa perlu merinci mekanisme spesifik dari eksploitasi tersebut.

Temuan-temuan linguistik ini menarik jika dikaitkan dengan latar belakang Prabowo sebagai politisi yang sering mengkritik liberalisasi ekonomi selama kampanye-kampanye politiknya. Representasi Indonesia sebagai korban eksploitasi ekonomi global dalam pidatonya tidak hanya berfungsi sebagai kritik terhadap tatanan ekonomi internasional, tetapi juga sebagai justifikasi untuk agenda-agenda kebijakan proteksionis yang mungkin akan diterapkan selama masa pemerintahannya. Hal ini menunjukkan bagaimana wacana dapat berfungsi sebagai sarana untuk melegitimasi tindakan politik dan kebijakan publik (DIJK, 2021)

Fenomena konstruksi nasionalisme ekonomi dalam pidato Prabowo dapat dipahami lebih mendalam melalui konsep hegemoni wacana yang dikembangkan oleh Gramsci dan dielaborasi dalam kerangka AWK oleh Fairclough. Melalui artikulasi wacana nasionalisme ekonomi, Prabowo berupaya membangun konsensus ideologis yang menaturalisasi kebijakan ekonomi tertentu sebagai kepentingan bersama seluruh bangsa, meskipun mungkin lebih menguntungkan kelompok ekonomi-politik tertentu. Menurut, (Fairclough, 2013), ideologi bekerja melalui naturalisasi wacana, di mana pandangan tertentu dinormalisasi dan diterima sebagai akal sehat (*common sense*). Dalam konteks ini, Prabowo menggunakan strategi linguistik untuk menaturalisasi gagasan bahwa kemajuan ekonomi Indonesia harus berlandaskan prinsip kemandirian dan kedaulatan.

(Wodak, 2009a) menjelaskan bahwa, wacana nasionalisme ekonomi seringkali dibangun melalui strategi argumentasi yang menghadirkan dikotomi antara "kita" (bangsa) dan "mereka" (kekuatan ekonomi global). Dalam pidato Prabowo, dikotomi ini terlihat dari bagaimana ia memposisikan Indonesia sebagai entitas yang harus "bangkit" dan melindungi diri dari eksploitasi ekonomi global. Strategi diskursif ini, yang oleh (Wodak, 2009b) disebut sebagai "strategi nominasi dan predikasi", berfungsi untuk membangun identitas kolektif nasional yang bersatu melawan ancaman eksternal.

(Chilton, 2004) dalam karyanya tentang analisis wacana politik mengemukakan bahwa para pemimpin politik sering menggunakan metafora untuk melegitimasi kebijakan ekonomi. Dalam pidato Prabowo, metafora "berdikari" dan "kedaulatan ekonomi" berfungsi tidak hanya sebagai deskripsi kebijakan, tetapi juga sebagai simbol moral yang melegitimasi pengambilan kebijakan proteksionis. Penggunaan metafora tersebut konsisten dengan apa yang disebut (Johnson, 2003) sebagai "metafora konseptual" yang membentuk cara masyarakat memahami isu-isu abstrak seperti ekonomi.

(Jørgensen & Phillips, 2012) menyoroti bagaimana wacana nasionalisme ekonomi sering terhubung dengan narasi sejarah untuk memperkuat legitimasinya. Prabowo mengaitkan agenda ekonominya dengan nilai-nilai perjuangan nasional dan visi para pendiri bangsa, menciptakan kontinuitas historis yang memperkuat legitimasi posisinya. Strategi intertekstualitas ini, menurut (Norman & Isabela, 2015) merupakan cara yang efektif untuk menanamkan ideologi dalam konteks sosial yang lebih luas.

Nasionalisme ekonomi yang diusung Prabowo juga mencerminkan apa yang disebut (Blommaert, 2005) sebagai "orders of indexicality", di mana wacana nasionalisme ekonomi tidak hanya merujuk pada kebijakan ekonomi semata tetapi juga

pada identitas nasional dan posisi Indonesia dalam tatanan global. Dengan demikian, konstruksi ideologis nasionalisme ekonomi berfungsi sebagai indeks yang menghubungkan kebijakan ekonomi dengan identitas kolektif bangsa.

Negosiasi Relasi Kekuasaan

Nilai relasional dalam teks pidato mengungkapkan strategi kompleks yang digunakan Prabowo untuk menegosiasikan posisinya dalam struktur kekuasaan. Di satu sisi, penggunaan modalitas deontik ("harus", "wajib") mencerminkan posisi otoritatif sebagai pemimpin tertinggi negara. Di sisi lain, penggunaan struktur kesantunan dan pronomina inklusif ("kita") menunjukkan upaya untuk membangun solidaritas dan mengurangi jarak sosial dengan rakyat.

Strategi diskursif ini dapat dipahami sebagai manifestasi dari apa yang (Fairclough, 2013) sebut sebagai "democratization of discourse", yaitu kecenderungan untuk mengurangi marker kekuasaan yang eksplisit dalam wacana publik. Namun, sebagaimana ditekankan oleh (Wodak, 2009b), demokratisasi wacana tidak selalu mencerminkan demokratisasi kekuasaan yang sesungguhnya. Dalam kasus Prabowo, penggunaan bahasa inklusif dapat dilihat sebagai strategi untuk membangun legitimasi populis, di mana ia memposisikan dirinya sebagai representasi dari kehendak rakyat meskipun secara struktural ia berada pada posisi kekuasaan tertinggi.

Bourdieu menyebut fenomena ini sebagai "symbolic power", di mana bahasa tidak hanya mencerminkan relasi kekuasaan tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan (Pierre Bourdieu, 1991). Penggunaan pronomina "kita" oleh Prabowo, menurut perspektif Bourdieu, dapat dipahami sebagai strategi untuk mengakumulasi "modal simbolik" dengan membangun kesan inklusivitas dan kebersamaan. Hal ini sejalan dengan apa yang disebut (Wodak & Meyer, 2003) sebagai "legitimation through authorization", di mana kekuasaan dilegitimasi melalui penggunaan bahasa yang membangun otoritas dan konsensus.

Fairclough dalam (Ruth Wodak, 2019) menjelaskan bahwa relasi kekuasaan dalam wacana seringkali bersifat asimetris namun tersamarkan melalui strategi linguistik tertentu. Dalam pidato Prabowo, asimetri kekuasaan antara presiden dan rakyat dikaburkan melalui penggunaan bahasa yang tampak egaliter, yang menurut Simpson dan Mayr merupakan ciri khas wacana politik kontemporer yang berupaya menyembunyikan hierarki kekuasaan di balik fasad demokrasi (Simpson, 2010).

Transformasi Citra dan Repositioning Politik

Nilai ekspresif dalam teks pidato menunjukkan upaya sistematis untuk mentransformasi citra Prabowo dari figur militer yang sering diasosiasikan dengan otoriter menjadi negarawan yang inklusif dan demokratis. Evaluasi positif terhadap nilai-nilai Pancasila, keberagaman, dan demokrasi berulang kali ditekankan dalam pidatonya, yang dapat diinterpretasikan sebagai respons terhadap kekhawatiran publik mengenai track record politiknya.

Fairclough menekankan bahwa transformasi wacana seringkali mencerminkan transformasi politik dan sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, pergeseran wacana Prabowo dapat dilihat sebagai bagian dari strategi repositioning politik yang lebih besar yang bertujuan untuk memperluas basis dukungan dan meredakan kekhawatiran kelompok-kelompok yang kritis terhadapnya. Penggunaan metafora "rumah bersama" dan "perjalanan bersama" secara khusus mencerminkan upaya untuk membangun narasi inklusif yang melampaui polarisasi politik yang terjadi selama masa kampanye (Fairclough, 1992).

Hall mengemukakan bahwa identitas politik bersifat dinamis dan selalu dalam proses "becoming" daripada "being" (Hall et al., 2014). Transformasi citra Prabowo mengilustrasikan konsep ini, di mana identitas politiknya direkonstruksi melalui praktik-praktik diskursif yang baru. (Norman & Isabela, 2015), menekankan bahwa perubahan wacana merupakan bagian integral dari perubahan sosial yang lebih luas, dan seringkali mencerminkan adaptasi terhadap konteks sosiopolitik yang berubah.

(Laclau et al., 2001), politik identitas selalu melibatkan artikulasi elemen-elemen diskursif yang sebelumnya terpisah ke dalam rantai ekuivalensi baru. Dalam pidato Prabowo, nilai-nilai yang sebelumnya tidak terlalu diasosiasikan dengan figur politiknya—seperti inklusivitas dan pluralism diartikulasikan ke dalam identitas politiknya yang baru sebagai presiden. Strategi ini, yang oleh (Chilton, 2004) disebut sebagai "reframing", memungkinkan aktor politik untuk mereposisi diri mereka dalam lanskap politik yang berubah.

Intertekstualitas dan Kontinuitas Historis

Analisis intertekstual menunjukkan bahwa teks pidato Prabowo mengandung referensi eksplisit dan implisit terhadap wacana-wacana historis, khususnya yang berkaitan dengan nasionalisme Indonesia era Soekarno. Data linguistik yang menjadi basis analisis intertekstualitas dalam pidato Prabowo mencakup beberapa bentuk penting.

Pertama, terdapat penggunaan langsung istilah-istilah ikonik dari era Soekarno. Prabowo secara eksplisit menggunakan istilah "berdikari" sebanyak tiga kali dalam pidatonya, termasuk dalam ungkapan: "Prinsip berdikari yang diajarkan Bung Karno harus kita hidupkan kembali dalam ekonomi nasional kita." Selain itu, konsep "Trisakti" juga dirujuk langsung dengan kutipan: "Sebagaimana Trisakti yang dicanangkan Bung Karno, kita akan mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan." Penggunaan terminologi khas ini merupakan bentuk intertekstualitas manifest yang dijelaskan Fairclough sebagai pengutipan langsung dari teks atau wacana lain.

Kedua, analisis menemukan reproduksi struktur retorik khas pidato Soekarno. Prabowo mengadopsi gaya retorika Soekarno melalui penggunaan seruan langsung kepada massa dengan frasa "Saudara-saudara sebangsa dan setanah air" yang muncul 5 kali dalam pidatonya. Selain itu, Prabowo juga menggunakan struktur repetitif berupa pertanyaan retorik berurutan yang mirip dengan gaya orasi Soekarno: "Sudah berapa lama kita didikte? Sudah berapa lama kita dieksploitasi? Sudah berapa lama kekayaan kita mengalir ke luar negeri?" Struktur retorik ini merupakan intertekstualitas konstitutif yang mengadopsi konvensi wacana tertentu tanpa merujuk secara eksplisit sumbernya.

Ketiga, data menunjukkan adanya appropriasi narasi perjuangan kemerdekaan. Prabowo menarik paralel langsung antara perjuangan ekonomi kontemporer dengan perjuangan kemerdekaan dengan menyatakan: "Perjuangan ekonomi hari ini adalah kelanjutan dari perjuangan kemerdekaan yang belum selesai" dan "Sebagaimana para pendiri bangsa berjuang melawan penjajahan fisik, kita hari ini berjuang melawan penjajahan ekonomi." Paralelisme historis ini merupakan bentuk interdiskursivitas yang mengaitkan wacana ekonomi kontemporer dengan wacana perjuangan kemerdekaan.

Keempat, terdapat rekontekstualisasi slogan-slogan Soekarno. Prabowo mengadaptasi slogan "Nasakom" (Nasionalisme, Agama, Komunisme) Soekarno menjadi: "Kita akan membangun ekonomi nasional berdasarkan tiga pilar: nasionalisme

ekonomi, keadilan sosial, dan kemajuan teknologi." Rekontekstualisasi ini menunjukkan bagaimana elemen wacana historis ditransformasi untuk konteks kontemporer.

(Fairclough, 2006) menekankan bahwa intertekstualitas tidak hanya berfungsi untuk menghubungkan teks dengan teks-teks sebelumnya, tetapi juga memiliki fungsi ideologis. Dalam kasus Prabowo, intertekstualitas dengan wacana Soekarno dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mengevaluasi kebijakannya dengan legitimasi historis dan memanfaatkan nostalgia akan era kebesaran Indonesia di masa lalu. Strategi ini mencerminkan apa yang disebut (Wodak, 2009b) sebagai "politics of the past", di mana representasi sejarah digunakan untuk tujuan politik kontemporer.

Kristeva dalam (Linstead, 2015) yang pertama kali mengembangkan konsep intertekstualitas, menekankan bahwa setiap teks merupakan mosaik dari kutipan-kutipan dan transformasi dari teks-teks sebelumnya. Menurut perspektif ini, referensi Prabowo terhadap wacana Soekarno tidak hanya sekadar mengutip, tetapi juga mentransformasikan wacana tersebut untuk konteks politik kontemporer. Bakhtin menyebut fenomena ini sebagai "dialogisme", di mana makna suatu teks selalu terkait dengan teks-teks sebelumnya dan antisipasi terhadap respons audiens (Bakhtin, 1981).

Allen menjelaskan bahwa intertekstualitas dapat berfungsi sebagai strategi legitimasi dengan menghubungkan wacana kontemporer dengan teks-teks yang telah memiliki otoritas historis (Allen, 2000). Dalam pidato Prabowo, referensi terhadap konsep-konsep Soekarno dapat dipahami sebagai upaya untuk meminjam otoritas historis Soekarno untuk melegitimasi posisi politiknya sendiri, strategi yang oleh van Leeuwen disebut sebagai "legitimation through reference to tradition" (Leeuwen Van & Wodak, 1999).

Implikasi terhadap Relasi Internasional

Representasi "yang lain" (other) dalam teks pidato, khususnya berkaitan dengan negara-negara asing dan organisasi internasional, mencerminkan orientasi politik luar negeri yang kompleks. Di satu sisi, Prabowo menekankan pentingnya kedaulatan dan non-interferensi; di sisi lain, ia juga mengakui pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan global. Ambivalensi ini mencerminkan posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang berusaha memaksimalkan otonominya dalam sistem internasional yang asimetris. Analisis terhadap data linguistik dalam pidato mengungkapkan beberapa pola representasi yang signifikan.

Pertama, analisis leksikal menunjukkan adanya dikotomi yang jelas antara "kita" (Indonesia) dan "mereka" (entitas asing). Data menunjukkan penggunaan pronomina "kita" sebanyak 37 kali dalam konteks pembahasan hubungan internasional, sementara entitas asing sering direpresentasikan melalui frasa seperti "negara-negara maju" (5 kali), "kekuatan asing" (4 kali), dan "pihak luar" (3 kali). Dikotomi ini diperkuat dengan penggunaan leksikal yang menandakan konfrontasi, seperti "melawan" (6 kali), "menolak" (4 kali), dan "mempertahankan" (7 kali) dalam konteks diskusi hubungan internasional.

Kedua, analisis modalitas mengungkapkan pola yang menarik. Ketika membahas kedaulatan nasional, Prabowo konsisten menggunakan modalitas deontik yang kuat seperti "harus" (12 kali) dan "wajib" (5 kali): "Kita harus mempertahankan kedaulatan kita dari intervensi asing" dan "Indonesia wajib menentukan nasibnya sendiri." Sebaliknya, ketika membahas kerja sama internasional, modalitas yang digunakan lebih moderat seperti "dapat" (8 kali) dan "bisa" (6 kali): "Indonesia dapat bekerja sama dengan semua negara" dan "Kita bisa berpartisipasi dalam forum global." Variasi modalitas ini mencerminkan ambivalensi dalam sikap terhadap hubungan internasional.

Ketiga, analisis koherensi teks menunjukkan penggunaan sistematis konjungsi adversatif ketika membahas relasi internasional. Frasa seperti "tetapi" (7 kali), "namun" (5 kali), dan "meskipun" (3 kali) sering menandai transisi antara pengakuan pentingnya kerja sama internasional dan penekanan pada kedaulatan: "Indonesia akan terus berpartisipasi dalam forum internasional, tetapi kita tidak akan mengorbankan kepentingan nasional kita" dan "Kita menghormati kerja sama global, namun kita akan selalu mendahulukan kepentingan rakyat Indonesia." Pola koherensi ini menegaskan posisi ambivalen Indonesia dalam relasi internasional.

Keempat, analisis presupposisi dan implikatur dalam teks mengungkapkan asumsi dasar tentang sistem internasional. Kalimat seperti "Kita tidak akan lagi menjadi korban sistem ekonomi global yang tidak adil" dan "Saatnya Indonesia bangkit dari ketergantungan pada pihak asing" mengandung presupposisi bahwa Indonesia telah menjadi korban dan berada dalam posisi subordinat dalam sistem internasional. Presupposisi ini mendasari legitimasi untuk sikap yang lebih asertif dalam hubungan internasional.

(Fairclough, 1992), menekankan bahwa wacana politik tidak hanya merepresentasikan realitas sosial tetapi juga berperan dalam membentuk realitas tersebut. Dengan demikian, representasi relasi internasional dalam pidato Prabowo tidak hanya mencerminkan pandangan personalnya, tetapi juga berpotensi memengaruhi arah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinannya. Hal ini menjadi signifikan dalam konteks global yang semakin kompleks dan multipolar.

Said dalam (Turner, 2004) tentang orientalisme menjelaskan bagaimana wacana dapat membentuk identitas nasional melalui konstruksi "yang lain". Dalam pidato Prabowo, konstruksi "yang lain" tidak hanya mencakup negara-negara asing tetapi juga sistem ekonomi global yang dipandang eksploitatif. (Hansen, 2006) mengemukakan bahwa identitas luar negeri selalu terkait dengan konstruksi identitas domestik, dan ambivalensi dalam representasi relasi internasional Prabowo dapat dipahami sebagai refleksi dari negosiasi kompleks antara identitas nasional Indonesia dengan posisinya dalam tata kelola global.

(Chilton, 2016) menekankan bahwa wacana politik luar negeri sering menggunakan strategi legitimasi yang menghubungkan kebijakan eksternal dengan nilai-nilai internal yang dianut masyarakat. Dalam pidato Prabowo, nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian yang dijunjung tinggi secara domestik digunakan untuk melegitimasi posisi negosiasi yang lebih asertif dalam hubungan internasional. (Fairclough, 2006) menyebut fenomena ini sebagai "rescaling of politics", di mana wacana nasional dan internasional saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.

Kontestasi Diskursif dalam Transisi Kekuasaan

Secara keseluruhan, analisis wacana kritis terhadap pidato perdana Presiden Prabowo menunjukkan adanya kontestasi diskursif yang mencerminkan dinamika politik Indonesia kontemporer. Teks pidato tidak hanya membangun legitimasi bagi kepemimpinan baru, tetapi juga menegosiasikan kontinuitas dan perubahan dalam lanskap politik nasional. Representasi kekuasaan dalam teks mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan politik dan mengakomodasi ekspektasi berbagai kelompok, mulai dari basis tradisional pendukung Prabowo hingga kelompok-kelompok yang sebelumnya kritis terhadapnya.

Sebagaimana ditekankan oleh (Fairclough, 2013) transisi kekuasaan politik seringkali ditandai dengan transformasi wacana yang mencerminkan pergeseran hegemoni. Dalam konteks ini, wacana Prabowo dapat dilihat sebagai negosiasi antara

warisan politik lama dengan tuntutan politik baru, antara ideologi konservatif dengan pragmatisme politik, dan antara orientasi nasionalis dengan kebutuhan untuk berintegrasi dengan ekonomi global. Kompleksitas ini mencerminkan realitas politik Indonesia yang terus berevolusi dalam menghadapi tantangan domestik dan global abad ke-21.

(Laclau, 2007) menyebut proses negosiasi politik semacam ini sebagai "artikulasi hegemonik", di mana berbagai elemen diskursif yang sebelumnya terpisah diartikulasikan ke dalam rantai ekuivalensi baru untuk membentuk blok hegemonik. Dalam pidato Prabowo, elemen-elemen diskursif yang berasal dari tradisi politik yang berbeda nasionalisme ekonomi, pragmatisme pembangunan, pluralisme budaya diartikulasikan ke dalam wacana kepresidenan yang kohesif namun juga mengandung kontradiksi internal.

Mouffe menekankan bahwa politik demokratis selalu melibatkan agonisme, yaitu kontestasi antara berbagai posisi politik yang saling bertentangan (Mouffe, 2014). Wacana kepresidenan Prabowo mencerminkan upaya untuk mentransformasikan antagonisme politik kampanye menjadi agonisme yang lebih produktif, di mana perbedaan diakui namun tidak mengancam kohesi sosial. Menurut perspektif Jessop, hal ini merupakan bagian dari "strategic selectivity" negara, di mana institusi-institusi negara beradaptasi untuk mengakomodasi keseimbangan kekuatan sosial yang baru (Jessop, 2004).

Simpulan

Analisis wacana kritis terhadap pidato perdana Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kompleksitas representasi kekuasaan yang termanifestasi melalui nilai eksperensial, relasional, dan ekspresif. Dari segi nilai eksperensial, terdapat konstruksi ideologi nasionalisme ekonomi yang kuat, ditandai dengan penggunaan repetitif kata-kata seperti "kedaulatan" dan "berdikari", pola transitivitas yang menempatkan Indonesia sebagai penerima tindakan (pasif) dalam hubungan ekonomi global dan sebagai aktor (aktif) dalam visi ekonomi masa depan, serta penggunaan metafora "perang" dan "perjuangan" yang membingkai ekonomi sebagai pertarungan eksistensial. Dari segi nilai relasional, pidato menunjukkan strategi negosiasi kekuasaan melalui penggunaan modalitas deontik yang mencerminkan otoritas, sekaligus struktur kesantunan dan pronomina inklusif yang mengurangi jarak sosial. Sementara itu, nilai ekspresif mengungkapkan upaya transformasi citra Prabowo menjadi negarawan yang inklusif dan demokratis melalui evaluasi positif terhadap nilai-nilai keberagaman dan demokrasi. Analisis intertekstualitas menemukan referensi eksplisit terhadap wacana nasionalisme Soekarno dan appropriasi struktur retorisnya, yang berfungsi memberikan legitimasi historis terhadap kebijakan kontemporer. Dalam konteks relasi internasional, terdapat ambivalensi yang tercermin dari penggunaan modalitas berbeda dan konjungsi adversatif yang menandai ketegangan antara kerjasama global dan kedaulatan nasional. Secara keseluruhan, representasi kekuasaan dalam pidato Prabowo menunjukkan kontestasi diskursif yang mencerminkan upaya menyeimbangkan berbagai kepentingan politik, menegosiasikan kontinuitas dan perubahan, serta mentransformasikan antagonisme menjadi agonisme yang lebih produktif dalam lanskap politik Indonesia kontemporer.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada istri dan anak, keluarga, serta seluruh yang memberikan bantuan baik bantuan tenaga maupun moril sehingga artikel ini bisa terselesaikan. Terkhusus ucapan terima kasih kepada dosen pembimbingku yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan Prof. Dr. Dadang S. Anshori, M.Si. dan Prof. Dr. Vismaia S. Damayanti, M.Pd.. serta Dr. Andoyo Sastromiharjo, M.Pd.

Daftar Pustaka

- Allen, G. (2000). *Intertextuality Second edition*.
- Bakhtin, M. M. (1981). The Dialogic Imagination. In *The Dialogic Imagination. Four Essays by M. M. Bakhtin*.
- Blommaert, J. (2005). *Discourse: A Critical Introduction*.
- Chilton, P. (2004). Analysing Political Discourse Theory and practice. *Language*, 82(3), 674–675. <https://doi.org/10.1353/lan.2006.0117>
- Chilton, P. (2016). *Analysing Political Discourse*. 1–23.
- DJJK, T. V. (2021). Critical Discourse Analysis. In *The Bloomsbury Handbook of Discourse Analysis, Second Edition: Vol. I*. <https://doi.org/10.1002/9781118663219.wbegss150>
- Fairclough, N. (1989). *Critical discourse analysis*.
- Fairclough, N. (1992). Discourse in Processes of Social Change: 'Transition in Central and Eastern Europe. *British and American Studies*, 11, 9–34.
- Fairclough, N. (2006). Language and globalization. *Language and Globalization*, 1–167. <https://doi.org/10.4324/9780203593769>
- Fairclough, N. (2013). Language and Power Second edition. *The Routledge Handbook of Discourse Analysis*, 2013, 9–19.
- Guetterman, T. C., Fetters, M. D., & Creswell, J. W. (2015). Integrating quantitative and qualitative results in health science mixed methods research through joint displays. *Annals of Family Medicine*, 13(6), 554–561. <https://doi.org/10.1370/afm.1865>
- Hall, C., Researcher, S. C., Work, S., Sciences, S., Matarese, M., Skills, D., Studies, S., Welfare, C., & Sciences, B. (2014). *Analysing Social Work Communication Discourse in practice*.
- Hansen, L. (2006). *Security as Practice: Discourse analysis and the Bosnian war*.
- Jessop, B. (2004). Critical semiotic analysis and cultural political economy. *Critical Discourse Studies*, 1(2), 159–174. <https://doi.org/10.1080/17405900410001674506>
- Johnson, L. &. (2003). Lakoff & Johnson Metaphors We Live By. *British Journal of Haematology*, 77(2), 237–244. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2141.1991.tb07983.x>
- Jørgensen, M., & Phillips, L. (2012). Discourse Analysis as Theory and Method. *Discourse Analysis as Theory and Method*. <https://doi.org/10.4135/9781849208871>
- Laclau, E. (2007). *On populist reason*. Verso.
- Laclau, E., Mouffe, C., Reflections, N., & Zitek, S. (2001). Hegemony and Socialist Strategy. *Hegemony and Socialist Strategy*, 149–194.
- Leeuwen Van, T., & Wodak, R. (1999). Legitimizing immigration control: A discourse-historical analysis. *Discourse Studies*, 1(1), 83–118. <https://doi.org/10.1177/1461445699001001005>
- Linstead, S. (2015). *Organization Theory and Postmodern Thought*. 6.
- Mouffe, C. (2014). Agonistics. Thinking the World Politically de Chantal Mouffe. *Íconos* -

- Revista de Ciencias Sociales*, 0(48), 157.
<https://doi.org/10.17141/iconos.48.2014.1215>
- Norman, F., & Isabela, F. (2015). Chapter 13. Textual Analysis 1. *The Routledge Handbook of Interpretive Political Science*, 186–198.
- Pierre Bourdieu. (1991). *Language and Symbolic Power*, Edited by John Thompson.
- Ruth Wodak, B. F. (2019). The Routledge handbook of language and Politics. *The Routledge Handbook of Language and Science*, 1–426.
<https://doi.org/10.4324/9781351207836>
- Simpson, P. (2010). Language and power : a resource book for students / Paul Simpson and Andrea Mayr. *Language and Power : A Resource Book for Students*, July.
- Turner, B. (2004). Edward W. Said: Overcoming Orientalism. *Theory, Culture & Society*, 21(1), 173–177. <https://doi.org/10.1177/0263276404041958>
- Wodak, R. (2009a). Critical Discourse Analysis. *Encyclopedia of the Sciences of Learning*, April, 846–846. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1428-6_2104
- Wodak, R. (2009b). The Discourse of Politics in Action. *Language in Society*, 41(4), 530–533.
<http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&CSC=Y&NEWS=N&PAGE=fulltext&D=psyc9&AN=2012-23416-006%5Cnhttp://linksource.ebsco.com/linking.aspx?sid=OVID:psycdb&id=pmid:&id=doi:10.1017%2FS004740451200053X&issn=0047-4045&isbn=&volume=41&issue=4&spage=530&date=2012>
- Wodak, R., & Meyer, M. (2003). Methods of Critical Discourse Studies. In *World* (Vol. 3, Issue February 2004). file:///Users/alex.neumann/Documents/Mendeley Desktop/Edited by Edited by/World/[Darren_Swanson]_Creating_Adaptive_Policies_A_Gui(BookSee.org).pdf